



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TIDAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAPTO NISWORO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 648269

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.098.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 415 m2/120 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 699.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 399.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 84.000.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC WONDER Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
2. MOBIL, DAIHATSU HIJET 1000/S7OP/R Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
3. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA ASTREA/C100 Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 456.382.705

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.638.382.705

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.638.382.705

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.